

## Fraksi KIR Apresiasi Pelaksanaan APBD 2023



Sumber gambar : *Tribunkaltim.co* Rabu, 19/06/2024

**SANGATTA** – Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 Kabupaten Kutai Timur telah usai dan mencapai pada proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pemerintah.

Sebelumnya, Pemerintah mendapatkan kembali gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Timur atas hasil evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.

Oleh sebab itu, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), gabungan dari Partai PKB dan Gerindra, mengapresiasi atas pencapaian tersebut.

“Kita berharap beberapa hal yang sudah dicapai dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023 agar lebih ditingkatkan lagi ke depannya dengan membuat target pencapaian yang maksimal,” ungkap Sekretaris Fraksi KIR DPRD Kutim, Sobirin Bagus, beberapa waktu lalu.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah bisa menggali secara kreatif dan inovatif sumber-sumber pendapatan alternatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien, yang berdasarkan pada kultur budaya kearifan lokal dan peningkatan kesejahteraan keberpihakan terhadap upaya masyarakat banyak.

Sebab, menurut Laporan Pertanggungjawaban APBD 2023, realisasi pendapatan sebesar Rp8,59 triliun atau 104,13 persen dari anggaran pendapatan sebesar Rp8,25 triliun yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk *profit sharing* dari PT. KPC, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagian pemerintah daerah dari PT. Tanito Harum.

Di sisi lain, pendapatan juga ditunjang dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. “Berkenaan dengan pencapaian pengelolaan belanja daerah, kami

mengharapkan agar ke depannya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tetap konsisten dengan RPJMD dan memprioritaskan pada penyerapan anggaran yang lebih maksimal, cepat, tepat, dan terpadu bagi pemanfaatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Di mana, rincian pelaksanaan belanja daerah terhadap APBD 2023 lalu meliputi belanja operasi sebesar Rp4,25 triliun atau 84,98 persen dari anggaran belanja operasi sebesar Rp5,00 triliun. Lalu, berasal dari belanja modal dengan realisasi sebesar Rp3,29 triliun atau 83,60 persen dari anggaran belanja modal sebesar Rp3,94 triliun.

Kemudian, ada belanja tak terduga yang tahun ini tidak dapat terealisasi dari anggaran belanja tidak terduga yang ditetapkan sebesar Rp20 miliar. “Sedangkan belanja transfer yang diberikan kepada pemerintah desa dengan realisasi sebesar Rp811,45 miliar atau 98,36 persen dari anggaran transfer sebesar Rp824,94 miliar,” pungkasnya **(adv/ri)**

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Fraksi KIR Apresiasi Pelaksanaan APBD 2023, 19/06/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014, kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.